



Dana Bagi Hasil Ekspor CPO

Hitung Berdasarkan Daerah Penghasil

PONTIANAK-Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji kembali menyoroti soal dana bagi hasil (DBH) dari ekspor minyak kelapa sawit mentah (CPO) di provinsi ini. Harapannya ke depan perhitungan DBH tersebut tidak lagi berdasarkan pintu ekspor tapi daerah penghasilnya.

Midji-sapaan karibnya menyebutkan, luas konsepsi perkebunan kelapa sawit di Kalbar saat ini mencapai 3,2 juta hektare. Namun dari jumlah tersebut yang sudah ditanami sekitar 2.003.188 hektare. Serta dengan produksi CPO mencapai 6,6 juta ton per tahun. "Kaitan dengan sekarang masalah



KUNKER: Gubernur Sutarmidji saat menerima kunker Komisi XI DPR RI ke Kalbar di Hotel Mercure, Kamis (2/2) lalu.

DBH saya berharap ke depan itu DBH dari sawit pembagiannya tidak berdasarkan pada pintu keluar ekspor. Karena keluar ekspor itu bukan kewajiban pemerintah pusat," ungkapnya saat menerima kunjungan kerja (kunker) Komisi XI DPR RI, baru-baru ini.

Kebijakan itu lanjut dia, tentu sangat merugikan bagi daerah yang tidak memiliki pelabuhan ekspor. Padahal Kalbar merupakan salah satu daerah penghasil CPO terbesar di Indonesia. "Ada 6,6 juta ton (CPO) per tahun, kalau kita kurangi 20 persen untuk kebutuhan dalam

negeri berarti masih ada 5,4 juta ton yang diekspor. (ekspor) Yang tercatat di Kalbar belum sampai satu juta ton, sisanya dibawa ke Dumai, Belawan, Tanjung Perak dan lainnya," ujarnya.

Selama pembagian DBH berdasarkan pintu ekspor, maka Kalbar menurutnya pasti dirugikan. Padahal provinsi ini juga butuh pemasukan yang besar untuk membangun infrastruktur. Salah satunya jalan sebagai jalur transportasi bagi operasional perkebunan sawit.

"Karena jalan Provinsi Kalbar yang panjang (total) 1.530 kilometer, yang merusak itu angkutan perke-

bunan sawit, kita tidak dapat (DBH) apa-apa," katanya.

Midji menjelaskan, rata-rata daya dukung jalan hanya kuat menahan kapasitas kendaraan dengan berat delapan ton. Sementara angka yang efisien untuk angkutan tandan buah segar (TBS) sawit, harus di atas 15 ton.

"Tidak bisa juga menyalahkan angkutan itu, hitungan ekonomis angkutan TBS harus 15 ton, kalau tidak, akan rugi. Ini yang kami berharap, ke depan ada keadilan dalam DBH itu agar kita bisa mengurangi masalah sosial," pungkasnya. (bar)